
Pendampingan Manajemen Administrasi Pemerintahan Kampung Berbasis Kebutuhan Lokal di Kampung Kuluakma Kabupaten Jayawijaya

Aswad Amir¹, Didik Usman Wibowo², Muhamad Fagi Dfinubun³

^{1,2,3}Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

E-mail: aswad.ip09@gmail.com¹, didikusmanwibowo@gmail.com²,
muhammadfagiunaimnyapiswamena@gmail.com³

Article History:

Received: 22 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 02 Februari 2026

Keywords: pendampingan, manajemen administrasi, pemerintahan kampung, kebutuhan lokal, pengabdian kepada masyarakat

Abstract: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kampung Kuluakma secara administratif terletak di Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman aparatur kampung terhadap manajemen administrasi, belum tertatanya sistem administrasi pemerintahan, serta rendahnya pemanfaatan administrasi sebagai instrumen pendukung pelayanan publik. Metode pelaksanaan PKM menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan lokal, sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, serta evaluasi kegiatan. Pendampingan difokuskan pada penguatan manajemen administrasi pemerintahan kampung yang meliputi administrasi surat-menyurat, pencatatan kegiatan pemerintahan, dan administrasi pelayanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur kampung dalam mengelola administrasi pemerintahan secara lebih tertib dan sistematis. Selain itu, kegiatan pendampingan ini mendorong terbentuknya praktik administrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan administrasi pemerintahan kampung yang berkelanjutan dan dapat direplikasi pada kampung lain dengan karakteristik serupa.

PENDAHULUAN

Pemerintahan kampung memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan kampung (Dwiyanto, 2017). Dalam konteks ini, kemampuan aparatur kampung dalam mengelola administrasi pemerintahan secara tertib, efektif, dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat kampung (Surajiyo, 2019). Administrasi pemerintahan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kepastian pelayanan publik bagi masyarakat (Sedarmayanti, 2018). Administrasi yang tertata dengan baik memungkinkan pemerintah kampung menjalankan fungsi pelayanan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban publik secara lebih sistematis dan berkelanjutan (Dunn, 2018).

Kampung Kuluakma merupakan salah satu kampung yang secara administratif berada di Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya. Sebagai kampung yang berada di wilayah pegunungan Papua, Kampung Kuluakma memiliki karakteristik sosial, geografis, dan kelembagaan pemerintahan yang khas, yang mempengaruhi pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kampung masih dijumpai berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparatur kampung terhadap manajemen administrasi pemerintahan, belum tersusunnya sistem administrasi yang baku dan terstandar, serta rendahnya pemanfaatan administrasi pemerintahan sebagai instrumen pendukung pelayanan publik dan pembangunan kampung (Dwiyanto, 2017; Surajiyo, 2019). Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan publik serta lemahnya tertib administrasi pemerintahan kampung.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan kemampuan aparatur kampung dalam menjalankan praktik administrasi pemerintahan sehari-hari. Di satu sisi, pemerintah kampung dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai prinsip *good governance* (Sedarmayanti, 2018), namun di sisi lain kapasitas aparatur kampung masih terbatas dalam mengelola administrasi pemerintahan secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan lokal agar mampu menjawab permasalahan yang dihadapi secara nyata dan kontekstual (Dunn, 2018). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini difokuskan pada pendampingan manajemen administrasi pemerintahan kampung berbasis kebutuhan lokal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung, memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kampung Kuluakma.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara tim pengabdian dengan aparatur Kampung Kuluakma. Pendekatan ini dipilih agar proses pendampingan berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal kampung. Tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan agar tujuan pendampingan dapat tercapai secara optimal. Adapun tahapan kegiatan PKM meliputi sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Lokal, dilakukan melalui observasi awal terhadap kondisi administrasi pemerintahan kampung serta diskusi mendalam dengan aparatur Kampung Kuluakma. Tahap ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif permasalahan administrasi pemerintahan yang dihadapi, meliputi aspek administrasi surat-menyurat, pencatatan kegiatan pemerintahan, dokumentasi pelayanan publik, serta mekanisme pengarsipan administrasi. Hasil identifikasi kebutuhan lokal menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan skema pendampingan yang sesuai dengan kondisi riil kampung.
2. Sosialisasi dan Koordinasi, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antara tim pengabdian dan aparatur kampung terkait tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta tahapan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan jadwal kegiatan, pembagian peran antara tim pengabdian dan aparatur kampung, serta penyepakatan komitmen bersama guna mendukung kelancaran pelaksanaan program PKM.
3. Pelatihan Manajemen Administrasi Pemerintahan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur kampung mengenai pentingnya administrasi pemerintahan dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Materi pelatihan meliputi administrasi surat-menyurat, pencatatan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan kampung, pengelolaan arsip administrasi, serta administrasi pelayanan publik. Pelatihan disampaikan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus yang disesuaikan dengan konteks pemerintahan kampung.
4. Pendampingan Teknis, dilakukan secara langsung dan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan administrasi pemerintahan kampung. Pada tahap ini, tim pengabdian mendampingi aparatur kampung dalam menerapkan materi pelatihan ke dalam aktivitas administrasi sehari-hari, seperti penyusunan dokumen administrasi, pengarsipan, dan pencatatan pelayanan publik. Pendampingan teknis difokuskan pada pemecahan permasalahan administratif yang dihadapi aparatur kampung sesuai dengan kebutuhan lokal Kampung Kuluakma.
5. Evaluasi Kegiatan, dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan PKM serta tingkat peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung, diskusi reflektif, dan penilaian terhadap perubahan praktik administrasi pemerintahan kampung. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan serta keberlanjutan program pendampingan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan manajemen administrasi pemerintahan kampung di Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung serta memperbaiki praktik administrasi pemerintahan di tingkat lokal. Hasil kegiatan ini dianalisis berdasarkan tahapan pelaksanaan PKM yang telah dilakukan, sehingga dapat menggambarkan kontribusi setiap tahapan terhadap capaian akhir kegiatan.

1. Hasil Tahap Identifikasi Kebutuhan Lokal

Pada tahap identifikasi kebutuhan lokal, diperoleh gambaran awal mengenai kondisi administrasi pemerintahan Kampung Kuluakma. Hasil observasi dan diskusi dengan aparatur kampung menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan masih dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur dengan baik. Administrasi surat-menyurat belum terdokumentasi

secara tertib, pencatatan kegiatan pemerintahan belum dilakukan secara konsisten, serta sistem pengarsipan dokumen masih bersifat sporadis. Selain itu, aparatur kampung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi strategis administrasi pemerintahan sebagai dasar pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan kampung. Temuan pada tahap ini menjadi dasar dalam perumusan materi pelatihan dan skema pendampingan yang relevan dengan kebutuhan riil kampung.

2. Hasil Tahap Sosialisasi dan Koordinasi

Tahap sosialisasi dan koordinasi menghasilkan kesepahaman antara tim pengabdian dan aparatur kampung terkait tujuan, manfaat, serta tahapan kegiatan pendampingan. Aparatur kampung menunjukkan respons yang positif dan keterbukaan terhadap kegiatan PKM yang dilaksanakan. Pada tahap ini juga terbentuk komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara aktif, termasuk kesediaan aparatur kampung untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan pendampingan. Hasil dari tahap ini terlihat pada meningkatnya partisipasi aparatur kampung selama proses kegiatan serta terciptanya komunikasi yang baik antara tim pengabdian dan pihak kampung.

3. Hasil Tahap Pelatihan Manajemen Administrasi Pemerintahan

Pelaksanaan pelatihan manajemen administrasi pemerintahan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur kampung. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa aparatur kampung mulai memahami konsep dasar administrasi pemerintahan, termasuk administrasi surat-menyurat, pencatatan kegiatan pemerintahan kampung, pengelolaan arsip, serta administrasi pelayanan publik. Aparatur kampung juga mulai menyadari pentingnya administrasi pemerintahan sebagai instrumen pendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kampung. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari kemampuan aparatur dalam menjelaskan kembali materi yang diberikan serta kesiapan mereka untuk menerapkan praktik administrasi pemerintahan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

4. Hasil Tahap Pendampingan Teknis

Pada tahap pendampingan teknis, hasil kegiatan terlihat lebih konkret dan aplikatif. Aparatur kampung mulai mampu menerapkan materi pelatihan ke dalam praktik pengelolaan administrasi pemerintahan secara langsung. Administrasi surat-menyurat mulai disusun dengan format yang lebih tertib, pencatatan kegiatan pemerintahan dilakukan secara rutin, serta pengarsipan dokumen mulai dilakukan secara lebih sistematis. Pendampingan teknis juga membantu aparatur kampung dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam praktik administrasi sehari-hari, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil pada tahap ini menunjukkan adanya perubahan nyata dalam perilaku dan kebiasaan kerja aparatur kampung dalam mengelola administrasi pemerintahan.

5. Hasil Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan PKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja aparatur kampung dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan. Aparatur kampung menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya administrasi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, hasil evaluasi juga mengidentifikasi perlunya keberlanjutan program pendampingan agar praktik administrasi pemerintahan yang telah diperbaiki dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Rekomendasi yang dihasilkan pada tahap evaluasi menjadi masukan penting bagi pemerintahan kampung dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan kampung.

Hasil kegiatan pendampingan manajemen administrasi pemerintahan kampung di Kampung Kuluakma menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur kampung melalui pendekatan

berbasis kebutuhan lokal memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan administrasi pemerintahan di tingkat kampung bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan regulasi, tetapi lebih pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas administrasi pemerintahan desa atau kampung sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintahan lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Sutoro Eko (2014) menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola administrasi desa pada umumnya disebabkan oleh rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami fungsi administrasi sebagai instrumen pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada tahap awal kegiatan PKM di Kampung Kuluakma, di mana administrasi pemerintahan masih dipahami sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, hasil kegiatan ini juga menguatkan temuan Dwiyanto (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal sangat bergantung pada tertibnya sistem administrasi pemerintahan. Dalam konteks Kampung Kuluakma, perbaikan administrasi surat-menyurat, pencatatan kegiatan pemerintahan, dan dokumentasi pelayanan publik terbukti mendorong aparatur kampung untuk bekerja lebih sistematis dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan yang tertib menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Pendekatan pendampingan berbasis kebutuhan lokal yang diterapkan dalam kegiatan PKM ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya mengenai pentingnya pendekatan kontekstual dalam program penguatan kapasitas aparatur desa. Hadi dan Wahyudi (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa program pelatihan dan pendampingan yang tidak disesuaikan dengan kondisi sosial dan administratif desa cenderung kurang efektif dan sulit diimplementasikan secara berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan yang bersifat umum, pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil Kampung Kuluakma terbukti mampu meningkatkan partisipasi aparatur kampung serta mempermudah proses internalisasi pengetahuan dan keterampilan administrasi pemerintahan.

Hasil kegiatan PKM ini juga menunjukkan bahwa proses pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan lebih efektif dibandingkan pelatihan satu arah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Prasajo dan Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa pendampingan lapangan memberikan ruang pembelajaran yang lebih aplikatif bagi aparatur desa, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku kerja secara nyata. Dalam kegiatan PKM ini, aparatur kampung tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga didampingi dalam praktik penyusunan dan pengelolaan administrasi pemerintahan, yang berdampak pada perubahan kebiasaan kerja sehari-hari.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), hasil kegiatan PKM ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi di tingkat kampung. Administrasi pemerintahan yang mulai tertib dan terdokumentasi dengan baik memberikan dasar bagi pemerintahan kampung untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan UNDP (1997) yang menekankan bahwa administrasi publik yang efektif merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa hasil kegiatan PKM di Kampung Kuluakma tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memperkuat temuan-temuan akademik sebelumnya mengenai pentingnya penguatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terarah, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara tuntutan tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan kemampuan aparatur kampung dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi tidak hanya pada peningkatan kapasitas aparatur kampung, tetapi juga pada pengembangan praktik tata kelola pemerintahan kampung yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pendampingan manajemen administrasi pemerintahan kampung berbasis kebutuhan lokal di Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola administrasi pemerintahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur kampung mengenai pentingnya administrasi pemerintahan sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pendampingan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi kebutuhan lokal, sosialisasi dan koordinasi, pelatihan, pendampingan teknis, hingga evaluasi, terbukti efektif dalam mendorong perubahan praktik administrasi pemerintahan kampung ke arah yang lebih tertib dan sistematis. Aparatur kampung mulai mampu menyusun administrasi surat-menyurat, melakukan pencatatan kegiatan pemerintahan, serta mendokumentasikan pelayanan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendekatan berbasis kebutuhan lokal menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan PKM ini karena memungkinkan program pendampingan disesuaikan dengan kondisi riil dan kemampuan aparatur kampung. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan keterampilan administrasi, tetapi juga berpotensi mendukung penguatan tata kelola pemerintahan kampung secara berkelanjutan. Ke depan, diperlukan dukungan dan pendampingan lanjutan agar praktik administrasi pemerintahan yang telah diperbaiki dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kampung.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparatur kampung yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap tahapan kegiatan pendampingan. Selain itu, penulis mengapresiasi dukungan institusi dan pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PKM ini hingga tersusunnya artikel ilmiah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Hadi, S., & Wahyudi, A. (2019). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 123–134.

- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).